BAB III

PROFILE PERUSAHAAN

3.1 Sejarah PT KERETA API (PERSERO) DAOP 2 BANDUNG

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA didesa Kemijen Jum'at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh "Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij" (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada Hari Sabtu, 10 Agustus 1867.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen - Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA didaerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 - 1900 tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 km, tahun 1870 menjadi 110 km, tahun 1880 mencapai 405 km, tahun 1890 menjadi 1.427 km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 km.



Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawasi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara Makasar - Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujungpandang - Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak - Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, juga pernah dilakukan studi pembangunan jalan KA.

Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang lebih 901 km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA disana.

Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm dibeberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 - 1943) sepanjang 473 km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah - Cikara dan 220 km antara Muaro -

Pekanbaru. Ironisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro - Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang memperkerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro - Pekanbaru.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam "Angkatan Moeda Kereta Api" (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada ditangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperkenankan lagi campur tangan dengan urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya "Djawatan Kereta Api Republik Indonesia" (DKARI).

Tabel Sejarah Kereta Api

Periode	Status	Dasar Hukum
Th. 1864	Pertama kali dibangun Jalan Rel sepanjang 26 km antara Kemijen Tanggung oleh Pemerintah Hindia Belanda	
1864 s.d 1945	Staat Spoorwegen (SS) Verenigde Spoorwegenbedrifj (VS) Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM	IBW
1945 s.d 1950	DKA	IBW
1950 s.d 1963	DKA - RI	IBW
1963 s.d 1971	PNKA	PP. No. 22 Th. 1963
1971 s.d.1991	PJKA	PP. No. 61 Th. 1971
1991 s.d 1998	PERUMKA	PP. No. 57 Th. 1990
1971 s.d.1991	PT. KERETA API (Persero)	PP. No. 19 Th. 1998 Keppres No. 39 Th. 1999 Akte Notaris Imas Fatimah

3.1.1 Visi dan Misi PT. KERETA API(PERSERO) DAOP 2 BANDUNG

Visi

Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan *stakeholders*.

Misi

Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi *stakeholders* dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan dan kenyamanan.

3.1.2 Arti Logo PT KERETA API (PERSERO) DAOP 2 BANDUNG



Logo dengan warna orange berupa gambar mirip angka 2, dengan kemiringan 70 derajat dan warna dasar putih yang menampakkan bagian depan kereta api kecepatan tinggi dengan arah yang saling berlawanan, serta di bagian bawah tertulis “KERETAPI” warna biru.

Gambar lambang menyiratkan sifat: tegas, pasti, tajam, gerak horisontal, juga bolak-balik. Dua garis lurus dengan ujung lengkung meruncing, dengan arah berlawanan, selain menggambarkan arah bolak-balik perjalanan kereta api, juga melambangkan pelayanan (memberi dan menerima).

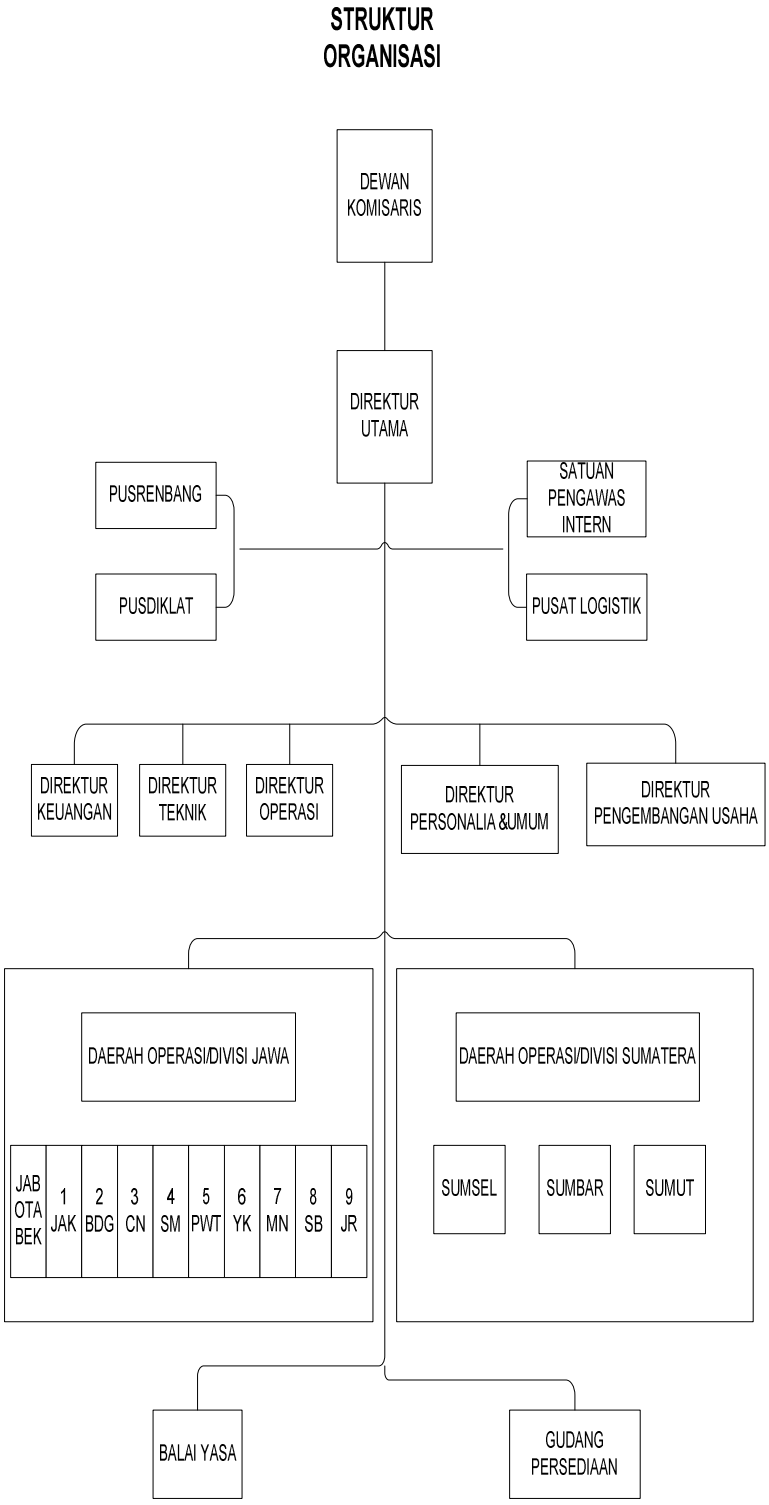
Gaya Gambar :

Lugas, langsung, tajam, teknis, selaras dengan staf teknis kereta api. Ujung garis tajam tapi melengkung untuk menyiratkan arah/kecepatan (aerodinamis), tetapi cenderung agak tumpul melengkung, tidak terlampau tajam, agar memberi kesan aman (sesuatu bentuk yang terlampau runcing lebih memberi kesan ancaman, rasa sakit dan agresivitas, asosiatif kepada senjata tajam, duri dan semacamnya.

Sifat Gambar :

Sifat gambar lebih lugas, obyektif, rasional karena bentuk geometrisnya yang dominan dan bersifat maskulin. Kesan sangat modern, teknis, jelas terlihat

3.2 Struktur Organisasi



GAMBAR SRUKTUR ORGANISASI

3.3 Deskripsi Kerja

Sesuai dengan keputusan Direksi Nomor Kep. U/OT.003/XI/2/KA-2002, susunan PT Kereata Api (Persero) tingkat pusat adalah sebagai berikut :

A. Direksi

Tugas pokoknya adalah:

1. Memimpin mengurus, dan mengelola PT Kereta Api (Persero) sesuai dengan tujuan dan tugas pokok perusahaan.
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan.
3. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar peradilan.
4. Melaksanakan kebijakan umum yang ditentukan oleh Menteri.
5. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan.
6. Menyiapkan pada waktunya Rencana Kerja Tahunan lengkap dengan anggaran PT Kereta Api (Persero).
7. Menyiapkan laporan pertanggung jawaban PT Kereta Api (Persero) dan perhitungan hasil usaha menurut cara dan waktu yang telah ditetapkan Menteri.
8. Menyiapkan susunan organisasi lengkap dengan perincian tugasnya.
9. Mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi PT Kereta Api (Persero).
10. Menetapkan peraturan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan bagi pegawai serta semua hal kepegawaian lainnya.

11. Memberi segala keterangan tentang keadaan dan jalannya PT Kereta Api (Persero), baik dalam bentuk laporan tahunan maupun laporan berkala.
12. Menjalankan kewajiban-kewajiban lain berdasarkan petunjuk Menteri.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan dan pengelolan kegiatan-kegiatan PT Kereta Api (Persero) secara terpadu.
2. Pengusahaan dan pengembangan prasarana serta sarana angkutan Kereta Api.
3. Pengembangan dan pendayagunaan SDM.
4. Pengembangan organisasi dan manajemen PT Kereta Api (Persero).
5. Pengelolaan keuangan PT Kereta Api (Persero).
6. Pengawasan Internal

B. DirekturUtama

Tugas dan wewenangnya:

1. Pembuat dan pemberi masukan pertimbangan dan sarana untuk kebijakan teknis.
2. Bertindak untuk dan atas nama baik direksi dan semua bidang.
3. Memimpin kegiatan Direktorat.
4. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijaksanaan direksi.

Direktorat atau bagian yang ada pada PT Kereta Api (Persero) berikut sub direktoratnya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Satuan Pengawas Intern (SPI)

Tugas bagian SPI adalah melakukan pengawasan .manajemen, pengujian, penilaian atas hasil Iaporan serta pengusutan alas perintah Direktur Utama menyangkut bidang keuangan, bagian teknis pemeliharaan prasarana, bagian operasi dan pemasaran (pelayanan) jasa angkutan kereta api, bidang administrasi personalia, administrasi umum dan administrasi pendidikan serta pelatihan, bidang perencanaari pembangunan penelitian teknologi infomasi dan sistem informasi serta bidang kelengkapan.

2. Bagian Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrenbang)

Tugas dan wewenangnnya :

a. Perencanaan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

b. Perencanaan dan pembangunan kurikulum serta pembinaan instruktur.

3. Direktorat Teknik

Direktorat Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana yang berkaitan dengan perolehan dan pendayagunaan, pemeliharaan serta perawatan atas sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional yang dimiliki perusahaan.

Direktorat Teknik terdiri dari:

a) Sub Direktorat Perencanaan Teknik.

b) Sub Direktorat Jalan Rel dan Jembatan.

c) Sub.DirektoratTanah dan Bangunan.

d) Sub Direktorat Sinyal, Telekomunikasi, danListrik.

4. Direktorat Operasi dan Pemasaran

Direktorat Operasi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknik operasi jasa angkutan Kereta Api serta pendayagunaan fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya. Direksi Operasi dan Pemasaran terdiri dari:

a) Sub Direktorat Lalu Lintas.

b) Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Penumpang.

c) Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Barang.

5. Direktorat Keuangan

Direktorat Keuangan mempunyai tugas pokok membina dan mengelola keuangan dan sediaan, serta menetapkan kebijakan tentang pendanaan, pendayagunaan keuangan, akuntansi, dan penyediaan.

Direktorat Keuangan mempunyai empat sub direktorat, yaitu:

a. Sub Direktorat Anggaran

Sub Direktorat Keuangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyusun program anggaran, mengkoordinasikan dan memadukan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), pelaksanaan otorisasi, pelaporan, pengendalian, pelaksanaan RAKP serta perhitungan PSO, TMO, TAC.

Sub Direktorat Anggaran terdiri dari;

1. Seksi Anggaran I.
2. Seksi Anggaran II.
3. Seksi Anggaran III.
4. Seksi Anggaran IV.

b. Sub Direktorat Administrasi Keuangan

Sub Direktorat Administrasi Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggaiakan dan mengelola tata usaha kas besar kantor pusat, nielaksanakan evaluasi pembayaran internal dan ekstemal, mengendalikan dan mendistribusikan dana, serta mendayagunakaan kas perusahaan, menyelesaikan administrasi asuransi serta memantau penyaluran dana PUKK.

Sub Direktorat Administrasi Keuangan terdiri dari:

1. Seksi Bendahara Kantor Pusat.
2. Seksi Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran.
3. Seksi Pengendaiian dan Pendayagiinan Kas Pemsahaan.
4. Seksi Asuransi dan PUKK.

c. Sub Direktorat Akuntansi

Sub Direktorat Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyusun Akuntansi Umum, Akuntansi Biaya, Akuntansi Verifikasi Kas, Akuntansi Pendukung dan Perpajakan.

Sub Direktorat Akuntansi terdiri dari:

1. Seksi Akuntansi Umum (Kepala Kelompok 1/kapok 1)

Kelompok penyelenggara anggaran mempunyai tugas pokok:

1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

2) Pengendalian Perencanaan Pclaksanaan Anggaran.

3) Menerbitkan Surat Otorisasi NPD (Nota Permohonan Dana).

4) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (RKA),

2. Seksi Verifikasi Kas (Kepala Kelompok II/Kapok II)

Kelompok penyelenggara verifikasi serta akuntansi pendapatan dan pengeluaran mempunyai tugas pokok:

1) Verifikasi, meneliti kelengkapan, kebenaran serta keabsahan yang berkenaan dengan pengeluaran dan pendapatan Daop 2 Bandung.

2) Akuntansi Pendapatan, Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Meneliti keiengkapan analisa dokumen lainnya yang diterima dari unit-unit pelaksana, mengikhtisarkan analisa stasiun, membuat bukti jurnal dan menyelenggarakan buku pembantu yang bersangkutan dengan pengeluaran dan pendapatan Daop 2 Bandung.

3. Seksi Akuntansi Biaya (Kepala Kelompok ITI/Kapok HI)

Kelompok penyelenggara akuntansi biaya, persediaan, dan aktiva tetap

mempunyai tugas pokok:

1) Pembiayaan dan dokumentasi lainnya yang diterima dari unit-unit
   pelaksana menyangkut akuntansi biaya.

2) Menyusun buku pembantu yang berkenaan dengan akuntansi biaya, persediaan dan aktiva tetap.

3) Melakukan pemantauan atas mutasi-mutasi terhadap aktiva tetap.

4. Seksi Akuntansi Pendukung (Kepala Kelompok IV/Kapok IV)

1) Proses komputerisasi akuntansi.

2) Penyelenggaraan buku besar.

3) Pembuatan daftar sisa.

4) Penyusunan neraca lajur.

5) Pembuatan jurnal khusus.

6) Pelaksanaan rekonsiliasi hubungan pembukuan

7) Penyelidikan terhadap angka akun yang tidak wajar pada neraca lajur yang akan dituangkan dalam Laporan Keuangan Daerah Operasi 2 Bandung.

8) Pembuatan laporan berkala ikhtisar dukungan laporan keuangan.